

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapai, dapat diketahui melalui informasi akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah karena berdasarkan informasi yang ada, pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi menurut Santoso (2008) dalam cefrida dkk (2014).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumberdaya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya sebagai instrumen untuk kegiatan kinerja pemerintah terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi akuntabilitas kinerja dan akan diteliti kembali adalah Komitmen organisasi, teknologi informasi dan mekanisme covorate governance terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah :

Variabel pertama dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi.

Menurut Kurniawan (2010) menyatakan bahwa Organisasi harus memberikan perhatian penuh dan membuat karyawan mempercayai organisasi sehingga komitmen karyawan akan diperoleh. Jika komitmen karyawan diperoleh, maka diperoleh karyawan yang loyal. Mengenai komitmen organisasi, Mayer dan Allen (1997) mengidentifikasi tiga tema dalam mendefinisikan komitmen. Ketiga tema tersebut adalah komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normative.

Variabel ke dua dalam penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan daerah. Zodia (2015) berpendapat bahwa Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi manajemen di suatu instansi pemerintah untuk membuat, menjalankan dan mengawasi kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu, dengan penerapan teknologi maka organisasi akan mengalami perubahan sistem manajemen dari sistem tradisional menjadi sistem manajemen kontemporer sehingga akan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan. Menurut Sutarman (dalam Handayani et al, 2020) menyatakan bahwa manfaat penerapan teknologi informasi adalah kecepatan, konsistensi, ketepatan, dan reliabilitas.

Variabel ke tiga dalam penelitian ini adalah mekanisme corporate governance.

Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik adalah good governance (kepemerintahan yang baik). (Wasistiono, 2003) mengemukakan bahwa tuntutan adanya good governance ini timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengontrol roda pemerintahan agar tidak salah dari tujuan jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula. Selanjutnya, (Purnomowati & Ismini, 2014) juga menambahkan bahwa upaya mengikutsertakan masyarakat (stakeholders) dalam pelaksanaan pembangunan hanya dapat terwujud bila kehidupan demokrasi berjalan dengan baik.

Variabel ke empat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja pemerintah. Mardiasmo (dalam Dena Handayanai et al, 2020) menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Berbeda dengan sektor privat, akuntabilitas di sektor publik merupakan suatu hal yang sudah pasti akan muncul. Akuntabilitas bagi pemerintah dinilai sangat penting untuk dimiliki disebabkan adanya akuntabilitas tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah serta diyakini mampu memberikan pelayanan public yang prima menuju pemerintahan yang demokratis. Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat.

Penelitian ini merupakan replikasi sekaligus pengembangan dari penelitian dari Levi Savila (2021) mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, Hal ini menunjukkan bahwa untuk bekerja pada presentasi di pemerintahan, penting untuk membuat kerangka kerja pengendalian akuntabilitas sehingga pemerintah dapat memberikan kepastian yang memuaskan untuk mencapai kelangsungan hidup dan efektivitas, Penggunaan teknologi informasi juga berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab akuntabilitas kinerja pemerintah, komitmen organisasi juga berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, Untuk mewujudkan tanggung jawab dalam suatu organisasi, dapat kita lihat dari sikap kerja keras dan dedikasi pekerja dalam menyelesaikan segala jenis pekerjaan, sangat baik dapat diduga bahwa kerangka pengendalian batin, penggunaan inovasi data, tanggung jawab hierarkis, kapabilitas otoritas pemerintah, dan konsistensi administratif pada saat yang sama memiliki hasil konstruktif yang besar pada tanggung jawab

pelaksanaan. pemerintah. OPD yang mengetahui tentang pentingnya dampak dari faktor-faktor yang digambarkan di atas akan menyelesaikan pelaksanaan tanggung jawabnya dengan tepat dan lugas.

Keterbaruan penelitian ini dari peneliiian terdahulu yakni berada pada penambahan 1 variabel baru yakni: Mekanisme Corporate Governence dalam kinerja pemerintah daerah. Tujuan utama dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan system pengendalian dan keseimbangan (*chek and balances*) untuk mencegah penyalah gunaan dari sumberdaya prusahaan atau organisasi dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan prusahaan atau organisasi. Proses penyusunan anggaran publik saat ini dan kedepan ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, dan inti dari kualitas pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan. *Good Corporate Governence* merupakan suatu proses dan strukur yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas oganisasi demi mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik. Kompetensi aparat pemerintah dalam hal ini penting dalam memperkenalkan kewajiban pemerintah dalam akuntabilitas sumber daya lokal karena setiap afiliasi, terlepas dari apakah publik atau swasta, dibingkai untuk mencapai tujuan tertentu, dan menerima yang dicapai, secara umum akan dianggap bermanfaat. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, harus ada komitmen yang kuat. Oleh karena itu, kapasitas menjadi penting untuk membantu hubungan dengan membina kewajiban pertunjukan mereka lebih lanjut. Otoritas publik harus memenuhi persyaratan penting yang dicatat dalam standar akuntansi otoritas publik.

Kabupaten Pesisir Barat secara resmi berdiri sejak tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364). Peresmian Kabupaten Pesisir Barat dilaksanakan pada tanggal 22 April 2013.

Tabel 1.1

**Opini BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk laporan hasil Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung**

NO	Nama Kabupaten/ Kota	Opini				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kabupaten Pesisir Barat	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP

Sumber : <http://www.bpk.go.id>

- : Belum dibentuk

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP – DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

WDP : Wajar Dengan pengecualian

TMP : Tidak Memberikan Pendapat

TW : Tidak Wajar

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang di publikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memenuhi criteria karakteristik kualitatif laporan keuangannya seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidak hematatan, ketidakefisienan, dan ketidak efektifan.

Fenomena ini ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, sebagai Kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Selain karena Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat memperoleh laporan keuangan yaitu TMP dan WDP dari

tahun 2014 sehingga diindikasikan memiliki kajian masalah yang perlu untuk diteliti. Pemilihan objek penelitian ini juga dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah kabupaten pesisir barat tahun 2019. Dalam laporan keuangan tersebut masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal yaitu perihal penataan asset yang dinilai masih kurang memadai. Dalam hal pengelolaan keuangan masih terdapat hal yang dinilai masih kurang memadai. Selain itu kabupaten pesisir barat dalam hal Pelaporan yang mengungkapkan kegiatan Keuangan Daerah kurang maksimal dikarenakan keterbatasan pengelolaan keuangan yg kurang ahli di bidang akuntansi sehingga akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target mencatat dan mengukur tingkat pencapaian visi dan misi pemerintah daerah melalui hasil-hasil yang ditampilkan baik berupa produk, jasa maupun proses kurang maksimal. Dari penjelasan tersebut ini berarti Kabupaten Pesisir Barat belum mewujudkan transparansi kinerja yg baik.

(pesisirbaratkab.go.id)

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah pada OPD di Kabupaten pesisir barat

2. Apakah Teknologi Informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Pada OPD Kabupaten Pesisir Barat.
3. Apakah Good Governance berpengaruh terhadap terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Pada OPD Kabupaten Pesisir Barat.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Beberapa Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman modal dan Pelayanan terpadu, Bagian Organisasi Kesekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada OPD di Kabupaten pesisir barat.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengaruh Teknologi Informasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada OPD di Kabupaten pesisir barat.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Good Governance terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada OPD di Kabupaten pesisir barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan :

1.5.1 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan peneliti tentang Dampak Komitmen organisasi, Teknologi informasi, dan mekanisme corporate government Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Pengelolaan Alokasi Dana Otonomi daerah serta bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Bagi IBI Darmajaya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi, khususnya Akuntansi Publik. Sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian lain yang ingin melanjutkan penelitian serupa dimasa yang akan datang.

1.5.3 Manfaat Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan tanggung jawab dan transparansi untuk kedepannya agar lebih baik dan sebagai sumber referensi dengan tujuan agar kinerja otoritas pemerintah dalam melayani masyarakat semakin meningkat.

1.5.4 Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang dana yg masuk ke pemerintah daerah yang mereka miliki sehingga masyarakat juga dapat ikut serta dalam pengelolaan keuangan daerah itu sendiri sehingga tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang dapat bersifat merugikan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri dari V bagian atau BAB, yang masing-masing tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Sistematika penyusunan ini diharapkan agar penyusunan proposisi ini dapat terkoordinasi dan efisien.

Gambaran lebih rinci mengenai penulisan skripsi ini dapat dilihat dalam setiap bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta

sistematika penulisan mengenai pengaruh komitmen organisasi, teknologi informasi dan mekanisme corporate government terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini mencakup di antaranya Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, analisis statistik, Bab ini menerapkan kerangka pemikiran yang mendukung perumusan hipotesis serta sangat membantu dalam penelitian dan analisis data. Di samping itu, terdapat ringkasan hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Bab ini juga berisi tentang kerangka pemikiran teoritis dan rumusan hipotesis yang timbul dari pemikiran tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi objek penelitian, alat dan bahan, metode pengumpulan data, prosedur penelitian, pengukuran variable dan metode analisis yang digunakan dalam pengaruh komitmen organisasi, teknologi informasi dan mekanisme corporate government terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil implementasi, analisis dan pembahasan penelitian. Hasil implementasi data, analisis dan pembahasan berupa hasil pengaruh komitmen organisasi, teknologi informasi dan mekanisme corporate government terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan dan bagi pembaca pada umumnya.